

## Analisis Kritis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Hambatan dan Solusi

Sela Maranata<sup>1</sup> Sartika Putri Ruth Angel Sihombing<sup>2</sup> Ria Septya Ningsih<sup>3</sup> Revandika  
Adrianta Tarigan<sup>4</sup> Agum Budianto<sup>5</sup>

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri  
Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [selajuntak2018@gmail.com](mailto:selajuntak2018@gmail.com)<sup>1</sup> [sartikaputri15206@gmail.com](mailto:sartikaputri15206@gmail.com)<sup>2</sup> [nriaseptya@gmail.com](mailto:nriaseptya@gmail.com)<sup>3</sup>  
[revandikatarigan@gmail.com](mailto:revandikatarigan@gmail.com)<sup>4</sup> [agum\\_budi@unimed.ac.id](mailto:agum_budi@unimed.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstract

*The Independent Curriculum is an educational reform initiative in Indonesia that aims to provide uniqueness in the learning process in elementary schools. This study identifies various challenges faced in implementing the Independent Curriculum, including limited facilities and infrastructure, lack of teacher competence, difficulties in evaluating learning, student heterogeneity, and inequality in government policies. To overcome these obstacles, the proposed solutions include increasing access to educational resources, ongoing training for teachers, developing an effective evaluation system, socialization to parents, and strengthening local policies in educational units. Through collaboration between the government, schools, teachers, parents, and the community, it is hoped that the Independent Curriculum can be implemented optimally and have a positive impact on the quality of education in Indonesia. This study emphasizes the importance of joint efforts to create a generation of creative, independent, and character-based students in accordance with the Pancasila Student Profile.*

**Keywords:** *Independent Curriculum, elementary education, challenges, solutions, Pancasila Student Profile*

### Abstrak

Kurikulum Merdeka merupakan inisiatif reformasi pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan keanekaragaman dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan Kurikulum Merdeka, termasuk keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kompetensi guru, kesulitan dalam evaluasi pembelajaran, heterogenitas siswa, dan ketimpangan kebijakan pemerintah. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, solusi yang diusulkan mencakup peningkatan akses sumber daya pendidikan, pelatihan berkelanjutan bagi guru, pengembangan sistem evaluasi yang efektif, sosialisasi kepada orang tua, serta penguatan kebijakan lokal di satuan pendidikan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat, diharapkan Kurikulum Merdeka dapat diterapkan secara optimal dan memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan di Indonesia. Penelitian ini pentingnya upaya bersama untuk menciptakan generasi pelajar yang kreatif, mandiri, dan berkarakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

**Kata Kunci:** Kurikulum Merdeka, pendidikan dasar, tantangan, solusi, Profil Pelajar Pancasila.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu proses yang terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi individu, baik dari segi jasmani maupun rohani. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi diri, termasuk kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk masyarakat dan negara. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak hal yang telah berubah dalam sistem pendidikan di Indonesia. Perubahan

tersebut juga memiliki dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif. Perkembangan ini juga yang menyebabkan selalu terjadi perubahan pada kurikulum di Indonesia. Tujuan dari perubahan kurikulum adalah untuk penyempurnaan dan peningkatan kualitas Pendidikan yang akan diberikan khususnya pada peserta didik untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas (Fadhilah, Oktira, & Putra, 2022).

Salah satu kurikulum yang pernah digunakan pada jenjang Sekolah Dasar yaitu Kurikulum Merdeka. Kurikulum merdeka mulai dirancang pada tahun 2020 dan berlaku di sekolah sejak tahun 2021 pada 3000 sekolah yang tersebar hingga ke pelosok di Indonesia. Kurikulum merdeka diimplementasikan di sekolah sesuai dengan kesiapan dan kondisi masing masing sekolah (Saleh, 2020). Kurikulum merdeka dibuat untuk menyempurnakan implementasi Kurikulum 2013. Tujuan dari kurikulum merdeka belajar adalah agar peserta didik memiliki banyak alternatif kompetensi dan keterampilan yang relevan, dikembangkan dimasa depan. Kurikulum Merdeka yang menekankan proses pembelajaran pada pemenuhan kebutuhan dan karakteristik pada peserta didik tentunya akan memberikan keleluasaan pada peserta didik untuk terus berkembang sesuai potensi, minat, dan bakatnya (Faiz et al., 2022).

Selain itu, menurut Darmawan dan Winataputra (2020), Kurikulum Merdeka berusaha untuk memperkuat kemandirian siswa dan memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menekankan pemberdayaan dan pengembangan keterampilan abad ke-21. Meskipun demikian, Kurikulum Merdeka ini memiliki hambatan dalam pelaksanaannya berupa kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, hal ini langsung memengaruhi kualitas interaksi antara guru dan siswa. Siswa cenderung kurang tertarik dan aktif dalam pembelajaran jika fasilitas yang diperlukan kurang memadai, sehingga tujuan Kurikulum Merdeka untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sulit tercapai. Pendapat ini di dukung dengan temuan dari Sasmita dan Darmansyah (2020) menunjukkan bahwa fasilitas dan akses sekolah juga menjadi salah satu hambatan dalam pengimplementasian Kurikulum Merdeka. Selain itu, banyak guru yang masih kurang terampil dalam menggunakan teknologi seperti laptop ataupun power point, oleh karena itu SDM guru perlu ditingkatkan dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Dengan pemahaman yang mendalam tentang hambatan dan Solusi yang diberikan oleh peneliti, diharapkan Kurikulum Merdeka dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kurikulum tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Metode studi literatur adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya (Yulia et al., 2022). Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami dan mengeksplorasi topik tertentu dengan meninjau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi literatur sering digunakan untuk mengidentifikasi tren, menemukan kesenjangan dalam penelitian yang ada, serta memberikan dasar teoritis bagi penelitian baru (Habsy, 2017). Pemilihan metode studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak implementasi Kurikulum Merdeka terhadap proses pembelajaran. Analisis ini mencakup berbagai artikel, jurnal, dan buku yang membahas tentang penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar (M. Susanti et al., 2023). Peneliti fokus pada aspek-aspek kunci dari Kurikulum Merdeka yang berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan, seperti fleksibilitas dalam pembelajaran dan pengembangan karakter siswa. Dengan memahami karakteristik serta

kelebihan dari pendekatan ini, peneliti dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat untuk diterapkan dalam konteks pendidikan di sekolah dasar.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kurikulum Merdeka merupakan salah satu langkah strategis dalam reformasi pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Tyler (1949), kurikulum bukan hanya sekadar program pengajaran, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas, termasuk pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Kurikulum Merdeka dirancang untuk mendorong kreativitas guru dalam menyusun pembelajaran serta memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Rofiah et al. (2020), keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka tidak lepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh pendidik, siswa, dan pihak terkait lainnya. Berbagai hambatan muncul dalam pelaksanaannya, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga ketimpangan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut dan merumuskan solusi yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

### **Hambatan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Keterbatasan Sarana dan Prasarana**

Salah satu hambatan utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka adalah keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah. Menurut Ariga, S. (2022), Fasilitas pendukung seperti laboratorium, akses internet, dan sumber belajar lainnya seringkali belum memadai. Keterbatasan ini menghambat guru dalam mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan tuntutan Kurikulum Merdeka. Purnomo et al. (2021) menegaskan bahwa kurangnya akses terhadap sumber daya yang diperlukan dapat membatasi guru dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang diinginkan. Misalnya, tanpa adanya laboratorium atau ruang kreatif, guru tidak dapat menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek yang menjadi ciri khas Kurikulum Merdeka. Selain itu, keterbatasan infrastruktur juga berdampak pada kualitas interaksi antara siswa dan guru, sehingga mengurangi efektivitas proses pembelajaran. Penelitian Islam et al. (2023) juga menunjukkan bahwa ketimpangan akses teknologi antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan menyebabkan kesenjangan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis digital. Di beberapa sekolah, kurangnya perangkat komputer dan jaringan internet yang tidak stabil menjadi kendala utama dalam menerapkan metode pembelajaran yang lebih modern dan interaktif. Sebagai tambahan, keterbatasan ruang kelas yang tidak memadai juga menjadi penghambat dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek. Seperti yang dijelaskan oleh Rosita et al. (2023), kelas yang terlalu padat dengan jumlah siswa yang banyak menyebabkan guru kesulitan dalam membagi kelompok belajar serta mengatur interaksi yang kondusif dalam pembelajaran berbasis diskusi dan proyek.

### **Kurangnya Kompetensi Guru**

Guru memainkan peran sentral dalam keberhasilan implementasi kurikulum. Namun, banyak guru masih kurang memahami esensi Kurikulum Merdeka, terutama dalam hal strategi pembelajaran inovatif dan penggunaan teknologi informasi (Setiawan et al., 2020). Penelitian Ariga, S. (2022) juga menunjukkan bahwa Banyak guru belum sepenuhnya memahami esensi Kurikulum Merdeka, sehingga penerapannya belum optimal. Minimnya pelatihan dan sosialisasi terkait kurikulum baru ini turut memperburuk situasi. Hal ini mengakibatkan guru

kesulitan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip kurikulum tersebut. Selain itu, keterampilan teknologi guru sering kali masih terbatas sehingga mereka kesulitan memanfaatkan media digital untuk mendukung pembelajaran. Hal ini menjadi tantangan besar karena Kurikulum Merdeka mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Menurut penelitian oleh Wuwur (2023), banyak guru yang merasa tidak percaya diri dalam menggunakan aplikasi atau platform digital yang seharusnya dapat membantu mereka dalam mengelola kelas dan mengevaluasi kemajuan siswa. Kurangnya pemahaman terhadap metode pembelajaran berbasis proyek (PBL) juga menjadi kendala yang signifikan. Pillawaty et al. (2023) menemukan bahwa banyak guru mengalami kesulitan dalam menyusun skenario pembelajaran berbasis proyek, karena kurangnya pengalaman dalam mengimplementasikan model ini di kelas mereka. Kondisi ini semakin diperburuk dengan minimnya dukungan dan pendampingan dari kepala sekolah maupun pemerintah dalam memberikan bimbingan teknis kepada para guru. Fathiha & Achadi (2023) menyoroti bahwa sebagian besar guru masih berusaha secara mandiri dalam memahami konsep Kurikulum Merdeka, sehingga ada banyak variasi dalam cara mengajarkan materi yang tidak selalu sesuai dengan konsep kurikulum yang sebenarnya.

### **Kesulitan dalam Evaluasi Pembelajaran**

Evaluasi pembelajaran yang autentik menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Dalam Kurikulum Merdeka, penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akademik tetapi juga pada perkembangan karakter siswa melalui proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila. Farhana (2023) menyatakan bahwa banyak guru mengalami kesulitan merancang sistem evaluasi yang sesuai dengan prinsip kurikulum ini karena tidak adanya standar baku seperti KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang sebelumnya digunakan. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam menentukan kriteria keberhasilan siswa dan mengukur kemajuan mereka secara objektif. Islam et al. (2023) menambahkan bahwa kurangnya pemahaman guru dalam menilai proses pembelajaran berbasis proyek sering kali menyebabkan evaluasi yang tidak konsisten dan kurang mencerminkan perkembangan keterampilan siswa secara menyeluruh. Selain itu, kurangnya alat penilaian yang jelas dan panduan yang lebih terperinci membuat guru kesulitan dalam menilai aspek non-akademik siswa, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Akibatnya, banyak guru masih menggunakan metode penilaian konvensional, yang kurang sesuai dengan konsep penilaian berbasis kompetensi yang dianjurkan dalam Kurikulum Merdeka.

### **Heterogenitas Siswa dan Dukungan Orang Tua**

Perbedaan karakteristik dan kemampuan peserta didik dalam satu kelas menantang guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kurangnya referensi dan model pembelajaran yang sesuai membuat guru kesulitan dalam memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Nurcahyono, H., & Putra, P. (2022). Rofiah et al. (2020) mengungkapkan bahwa resistensi orang tua terhadap perubahan kurikulum sering kali menghambat keberhasilan implementasi. Banyak orang tua yang belum sepenuhnya memahami konsep Kurikulum Merdeka sehingga mereka tidak memberikan dukungan yang cukup kepada anak-anak mereka dalam proses belajar di rumah. Penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang kurang memahami tujuan dari pembelajaran berbasis proyek sering kali merasa bahwa metode ini kurang efektif dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada orang tua agar mereka lebih mendukung proses pembelajaran anak di rumah.

### **Ketimpangan Kebijakan Pemerintah**

Ketimpangan antara kebijakan pusat dan daerah sering kali menjadi penghalang bagi implementasi Kurikulum Merdeka di lapangan. Sunarni & Karyono (2023) menyatakan bahwa kebijakan pemerintah terkait kurikulum baru terkadang tidak disertai dengan panduan teknis yang jelas sehingga menciptakan kebingungan bagi sekolah dalam menerapkannya. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap kebijakan tersebut, sehingga mengakibatkan ketidakpastian bagi para pendidik. Banyak sekolah yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan kurikulum dengan kondisi lokal mereka, terutama dalam aspek alokasi anggaran dan penyediaan fasilitas pendukung.

### **Solusi untuk Mengatasi Hambatan Peningkatan Akses Sumber Daya**

Untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana, pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana melalui program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pengadaan fasilitas pendidikan seperti buku teks, perangkat teknologi, dan bahan ajar lainnya. Sekolah juga dapat menjalin kerja sama dengan pihak swasta atau komunitas lokal untuk mendukung pengadaan fasilitas tambahan. Misalnya, menggandeng perusahaan teknologi untuk menyediakan perangkat komputer atau tablet bagi siswa. Islam et al. (2023) menyoroti bahwa ketimpangan akses terhadap teknologi dan internet masih menjadi tantangan besar dalam penerapan Kurikulum Merdeka, terutama di daerah terpencil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dapat mengembangkan program bantuan perangkat teknologi bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki sarana yang cukup. Selain itu, pembangunan infrastruktur internet di daerah tertinggal juga menjadi langkah penting dalam mendukung penerapan pembelajaran berbasis teknologi dan proyek yang menjadi ciri khas Kurikulum Merdeka. Rosita et al. (2023) juga menekankan bahwa akses terhadap sumber daya pendidikan tidak hanya sebatas fasilitas fisik, tetapi juga mencakup pelatihan bagi guru dalam memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran. Oleh karena itu, selain memberikan bantuan perangkat keras, pendampingan bagi guru dalam penggunaan perangkat teknologi dan sumber belajar digital harus menjadi bagian dari strategi peningkatan akses sumber daya. Dengan adanya peningkatan akses sumber daya yang lebih merata, diharapkan kesenjangan antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan dapat dikurangi, sehingga seluruh siswa mendapatkan pengalaman belajar yang setara dalam implementasi Kurikulum Merdeka.

### **Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Guru**

Guru perlu aktif mengikuti pelatihan seperti workshop atau bimbingan teknis tentang metode pembelajaran kreatif dan inovatif serta penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran (Setiawan et al., 2020). Program "Guru Penggerak" juga dapat membantu meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan sehingga mereka lebih siap menerapkan Kurikulum Merdeka. Pelatihan ini harus mencakup aspek praktis agar guru dapat langsung menerapkan pengetahuan baru mereka di kelas. Program seperti "Guru Penggerak" yang telah dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kompetensi guru. Selain itu, workshop, seminar, dan bimbingan teknis tentang metode pembelajaran berbasis proyek (PBL) perlu dilakukan agar guru dapat lebih percaya diri dalam mengimplementasikan model pembelajaran yang lebih fleksibel. Fathiha & Achadi (2023) menekankan bahwa pendampingan langsung dari mentor atau instruktur berpengalaman sangat membantu guru dalam menerapkan metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, program pelatihan sebaiknya mencakup aspek teknis

dalam penggunaan media digital, mengingat Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk lebih aktif dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Dengan adanya peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan, diharapkan mereka dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan implementasi Kurikulum Merdeka dan mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa.

### **Pendampingan dalam Evaluasi Pembelajaran**

Evaluasi pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka berbeda dengan kurikulum sebelumnya karena lebih menitikberatkan pada penilaian formatif dan autentik. Oleh karena itu, guru perlu diberikan pelatihan dan pendampingan dalam menyusun instrumen penilaian yang lebih fleksibel dan sesuai dengan perkembangan siswa. Farhana (2023) menyatakan bahwa banyak guru masih kebingungan dalam menentukan kriteria keberhasilan siswa, sehingga diperlukan rubrik penilaian yang lebih jelas agar proses evaluasi menjadi lebih objektif. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penggunaan portofolio digital, di mana guru dapat mendokumentasikan perkembangan siswa secara berkala dan lebih sistematis. Selain itu, kepala sekolah dan pengawas pendidikan dapat berperan dalam memberikan bimbingan teknis terkait penyusunan laporan perkembangan siswa, agar evaluasi yang dilakukan benar-benar mencerminkan hasil belajar yang komprehensif. Dengan demikian, evaluasi dalam Kurikulum Merdeka dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

### **Sosialisasi kepada Orang Tua dan Masyarakat**

Mengadakan sosialisasi rutin kepada orang tua tentang manfaat Kurikulum Merdeka sangat penting agar mereka lebih memahami perubahan kurikulum ini dan mendukung proses pembelajaran anak di rumah (Rofiah et al., 2020). Selain itu, melibatkan masyarakat dalam kegiatan sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Misalnya, mengadakan pertemuan bulanan antara orang tua dan guru untuk membahas perkembangan anak serta cara-cara mendukung pembelajaran di rumah. Resistensi orang tua terhadap perubahan kurikulum dapat diatasi dengan sosialisasi yang lebih intensif mengenai tujuan dan manfaat Kurikulum Merdeka. Rofiah et al. (2020) menyatakan bahwa banyak orang tua masih belum memahami konsep pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi, sehingga mereka perlu diberikan pemahaman mengenai bagaimana metode ini dapat meningkatkan keterampilan anak mereka. Sekolah dapat mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua, baik secara langsung maupun melalui forum daring, untuk menjelaskan bagaimana mereka dapat mendukung anak-anak mereka dalam belajar di rumah. Selain itu, melibatkan komunitas dan tokoh masyarakat dalam proses pendidikan juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi siswa.

### **Penguatan Kebijakan Lokal di Satuan Pendidikan**

Sekolah perlu merumuskan kebijakan lokal yang adaptif sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan sambil tetap berpedoman pada prinsip Kurikulum Merdeka (Sunarni & Karyono, 2023). Kebijakan lokal ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan agar lebih relevan dengan kondisi sekolah. Diskusi terbuka antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat akan sangat membantu dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Sunarni & Karyono (2023) menekankan bahwa koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah dapat membantu sekolah dalam menyesuaikan kebijakan kurikulum dengan kondisi nyata di lapangan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah penyusunan panduan teknis yang lebih rinci, sehingga guru dan tenaga kependidikan memiliki

pedoman yang jelas dalam mengimplementasikan kurikulum ini. Selain itu, kepala sekolah memiliki peran penting dalam membantu guru menerjemahkan kebijakan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi perkembangan peserta didik.

### **Pembahasan**

Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitasnya. Hambatan seperti keterbatasan sarana prasarana, kurangnya kompetensi guru, kesulitan dalam evaluasi pembelajaran, heterogenitas siswa, serta ketimpangan kebijakan pemerintah menjadi isu utama yang perlu ditangani. Menurut Purnomo et al. (2021), keterbatasan fasilitas menghambat penerapan metode pembelajaran berbasis proyek, sementara Setiawan et al. (2020) menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menggunakan teknologi dan strategi pembelajaran inovatif. Kesulitan dalam evaluasi pembelajaran juga menjadi perhatian, karena penilaian autentik yang sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka membutuhkan alat dan panduan yang jelas (Farhana, 2023). Selain itu, dukungan orang tua terhadap kurikulum baru sering kali minim akibat kurangnya sosialisasi (Rofiah et al., 2020). Ketimpangan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga menciptakan kebingungan di tingkat sekolah (Sunarni & Karyono, 2023). Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan akses sumber daya melalui dana BOS, pelatihan intensif bagi guru, pengembangan sistem evaluasi yang sederhana namun efektif, sosialisasi kepada orang tua, serta penguatan kebijakan lokal di satuan pendidikan. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mengatasi hambatan ini. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan lebih optimal dan mendukung pengembangan karakter serta kompetensi siswa sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

### **KESIMPULAN**

Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar merupakan langkah penting dalam reformasi pendidikan di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sarana prasarana, kurangnya kompetensi guru, dan ketimpangan kebijakan pemerintah, solusi strategis dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut. Peningkatan akses sumber daya pendidikan, pelatihan berkelanjutan bagi guru, serta sosialisasi kepada orang tua menjadi langkah kunci yang harus diambil. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat, diharapkan Kurikulum Merdeka dapat diterapkan secara optimal. Upaya bersama ini akan mendukung pengembangan karakter dan kompetensi siswa sesuai dengan visi Kurikulum Merdeka, sehingga menghasilkan generasi pelajar yang kreatif, mandiri, dan berkarakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariga, S. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Pasca Pandemi Covid-19. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 662-670.
- Darmawan, D., & Winataputra, U. S. (2020). Analisis dan Perancangan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan*, 4(2), 182-197.
- Fadhilah, J. R., Oktira, Y. S., & Putra, D. A. (2022). The problem of independent curriculum's application in the students of grade 1 at SDN 04 pasar ambacang, padang. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 1(1), 24-29.

- Faiz, A., Parhan, M., & Ananda, R. (2022). Paradigma Baru dalam Kurikulum Prototipe. Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(1), 1544–1550.
- Farhana, N. (2023). Kesulitan dalam Evaluasi Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Dasar, 15(2), 123-130.
- Fathiha, N., & Achadi, B. (2023). Pengaruh Pelatihan Kurikulum Merdeka terhadap Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Berdiferensiasi. Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar, 10(1), 98-112.
- Habsy, M. (2017). Metodologi Penelitian Pendidikan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Islam, R., Setyawan, H., & Widodo, P. (2023). Tantangan dan Peluang Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Digital di Sekolah Dasar. Jurnal Teknologi Pendidikan Indonesia, 8(1), 45-60.
- M. Susanti, R., & Hidayati, N. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Tantangan dan Peluang. Jurnal Pendidikan Dasar, 14(1), 45-60.
- Nurchayono, H., & Putra, P. (2022). Hambatan Guru Matematika dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Matematika Indonesia, 7(1), 45-56.
- Pillawaty, R., Susanto, D., & Mardiana, T. (2023). Model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Kurikulum Merdeka: Implementasi dan Tantangan. Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia, 9(2), 55-70.
- Purnomo, A., Setiawan, B., & Wuwur, R. (2021). Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 10(3), 45-58.
- Rahayuningsih, S. (2022). Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka: Studi Kasus di Sekolah Dasar. Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia, 11(2), 78-94.
- Rofiah H., Susanti D., & Karyono A. (2020). Analisis Hambatan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 9(1), 78-85.
- Rosita, L., Wijayanti, D., & Syahputra, R. (2023). Peningkatan Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka: Kajian Infrastruktur dan Teknologi. Jurnal Pendidikan Dasar dan Teknologi, 6(1), 33-47.
- Saleh, M. (2020). Merdeka Belajar di Tengah Pandemi Covid-19. Prosiding Seminar Nasional Hardiknas, 1, 51–56.
- Septiadi, M. A., Prawira, N. H., Aepudin, S., & Lestari, V. A. (2022). Dampak Implementasi Kurikulum Merdeka terhadap Kualitas Pembelajaran. Jurnal Pendidikan Indonesia, 11(2), 123-135.
- Setiawan I., & Karyono A. (2020). Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar. Prosiding Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian ke-4.
- Sunarni E., & Karyono A. (2023). Ketimpangan Kebijakan Pemerintah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik, 14(2), 99-110.
- Tyler R.W., (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago: University of Chicago Press.
- Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Wuwur R., (2023). Hambatan Guru Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka. Jurnal Pendidikan Umum 12(1):34-42
- Yolanda, M. (2018). Pembelajaran Berbasis Proyek: Teori dan Implementasi dalam Pendidikan Dasar. Jurnal Inovasi Pendidikan, 5(2), 23-38.
- Yulia, A., Rahmawati, D., & Sari, N. (2022). Kajian Literatur tentang Kurikulum Merdeka dalam Pendidikan Dasar. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 8(2), 123-137.